

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yunasril. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hariyono, Paulus. 2011. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Huda, Ni'Matul. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Juwaini, Jazuli. 2007. *Otonomi Sepenuh Hati*. Jakarta: Al-I'Tishom Cahaya Umat.
- Manan, Bagir. 1994. *Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UUI.
- Pangerang, Moenta., & Pradana Anugrah. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi Sipil (Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan)*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ridwan, Juniarso, & Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sarjono, Yetty. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitri, Ronny Hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunarno, H. Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Tesis

Irwan, A. L. (2008, Juli). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia. *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, 90-97.

Prabowo, I. A., Indarja, & Amalia Diamantina. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekalongan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3, 1-18.

Rukmana, M. G. (2019, Juni). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 2, 67-78.

Pramono, Angga Setyo (2019). Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang. Skripsi Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, Diakses pada 18 Oktober 2020, pukul 19.00 wib

Suprpto, Heru. “Ulang Tahun Satuan Polisi Pamongpra (Satpol PP) ke – 58,” dalam <http://rakyatmiskin.wordpress.com/2008/04/09/60/>, Diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 20.00 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 18.30 wib.

Goeroendesofiles.wordpress.com/.../penelitian-deskriptif-analitis.doc., Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2020

www.bappenas.go.id. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 09.00 wib.

<https://www.patikab.go.id/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 10.30 WIB.